

# **Implementasi Peran BPD dalam Pengawasan Kebijakan Tingkat Desa**

Latar belakang munculnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kebijakan tingkat desa tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan dan pemerintahan secara mandiri. Namun, kewenangan ini juga diiringi dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan program pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel. BPD hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan tujuan menciptakan sistem pengawasan yang efektif dalam pemerintahan desa.

## **Tujuan dan Fungsi BPD dalam Pengawasan Kebijakan Tingkat Desa**

Tujuan utama dari implementasi peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan program pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, dan efektif. BPD bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, BPD juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

Fungsi BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa tidak hanya sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan program pembangunan. Dengan adanya BPD yang efektif, pemerintah desa dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi masalah, melakukan perbaikan, dan memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan secara optimal. BPD juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

## **Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Peran BPD**

Pemerintah desa memegang peran kunci dalam implementasi peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa. Pertama, pemerintah desa bertugas untuk memastikan bahwa BPD memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Hal ini mencakup pembuatan peraturan desa tentang pengawasan, penetapan standar operasional prosedur (SOP), dan pembentukan tim pengawas internal yang independen dan kompeten.

Kedua, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara konsisten dan transparan. Ini berarti pemerintah desa harus melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan keuangan, pelaksanaan program pembangunan, dan pelayanan publik. Selain itu,

pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa hasil pengawasan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi warga dalam pengawasan.

Ketiga, pemerintah desa harus memastikan bahwa peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa dilakukan secara inklusif dan merata. Artinya, seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda, harus mendapatkan akses terhadap informasi hasil pengawasan. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa sistem ini ramah pengguna dan dapat dioperasikan oleh perangkat desa dengan berbagai tingkat kemampuan teknis.

### **Dampak Implementasi Peran BPD dalam Pengawasan Kebijakan Tingkat Desa**

Implementasi peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa telah membawa dampak positif bagi pemerintahan desa dan masyarakat. Pertama, terjadi peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan. Masyarakat dapat dengan mudah memantau alokasi dan penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Kedua, efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan semakin meningkat. Dengan adanya BPD yang efektif, pemerintah desa dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi masalah, melakukan perbaikan, dan memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan secara optimal. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk lebih fokus pada pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa semakin meningkat. Dengan akses yang mudah terhadap informasi hasil pengawasan, masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Hal ini mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

### **Tantangan dan Harapan ke Depan**

Meskipun dampak positifnya sudah terlihat, implementasi peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa masih menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola sistem pengawasan secara efektif. Selain itu, masih ada keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip pengawasan internal. Di sinilah peran pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan, untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan dukungan finansial kepada desa-desa yang masih tertinggal.

Ke depan, harapannya adalah peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa dapat menjadi alat yang semakin efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait, sistem ini

dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal.

## **Kesimpulan**

Implementasi peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa memegang peran sentral dalam merumuskan mekanisme pengawasan, memastikan konsistensi dan transparansi, serta memastikan bahwa sistem ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun masih ada tantangan, dampak positif peran BPD dalam pengawasan kebijakan tingkat desa telah dirasakan oleh banyak desa di Indonesia. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, sistem ini dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.